

ABSTRAK

Pendidikan merupakan faktor penting dalam peradaban manusia, mendapatkan pendidikan yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara dan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah, hal itu telah tertuang dalam Konstitusi dasar negara Indonesia, pengawasan terhadap program pendidikan dalam hal ini wajib belajar di kabupaten kendal telah di berikan kepada UPTD kendal untuk menjadi badan yang mengawasi agar program tersebut berjalan sesuai dengan semestinya dan hasilnya nanti dapat menjadi bahan evaluasi ditahun berikutnya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mempelajari dan meneliti timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial, aspek utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah peraturan formil, data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder. Selanjutnya data itu analisis sesuai dengan kebutuhan.

UPTD kecamatan Limbangan mempunyai tugas yaitu mengawasi dari badan terkait untuk memberikan layanan yang baik agar program wajib belajar dapat berjalan deng semestinya, bentuk tugas dari UPTD yaitu sosialisasi kepada lembaga dan masyarakat. Berdasarkan data dari dinas pendidikan kabupaten kendal sejauh ini pelaksanaan dari program wajib belajar mengalami kemajuan, dilihat dari menurunnya angka putus sekolah, dan meningkatnya pelajar dari tahun ke tahun.

Kata Kunci: Implementasi, UPTD, wajib belajar.

ABSTRACT

Education is an important factor in human civilization, getting a decent education is the basic right of every citizen and is one of the obligations that must be fulfilled by the government, it has been contained in the basic Constitution of the state of Indonesia, supervision of educational programs in this case compulsory study in the district of kendal has been given to the UPTD kendal to be the oversight body for the program to run properly and the results can later become the evaluation material next year.

This study uses sociological juridical approach method that is studying and researching reciprocity between law and social institutions, the main aspect used in this research is formal regulation, the data used are primary data, secondary data. Furthermore, the data analysis is in accordance with the needs.

UPTD Kecamatan Limbangan has the duty of overseeing from related bodies to provide good service for compulsory learning program to run properly, form of task of UPTD that is socialization to institution and society. Based on data from the district education offices of kendal so far the implementation of the compulsory education program is progressing, judging by the decreasing dropout rate, and the increasing of students from year to year.

Keywords: Implementation, UPTD, compulsory education.